TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

David Fahril Verdian
NPP. 32.0422
Asdaf Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Keuangan Publik
Email: 32.0422@praja.ipdn.ac.id
Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Fitri Rahmadany, S.I.P, M.Tr. IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Digital transformation in the preparation of local government financial reports is still not running well, indicated by the adoption of information technology in the Local Government Accounting System (SAPD) which is still not optimal with the discovery of 678 findings related to weaknesses in the accounting information system. Digital transformation in the preparation of government financial reports is hampered by system errors in the process of preparing local government financial reports, reporting features that are not yet fully perfect and users who need more time to understand and operate the system.* ***Purpose:*** *To determine and analyze digital transformation in the preparation of local government financial reports in Kudus Regency.* ***Method:*** *This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach in Kudus Regency, Central Java Province. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed using Kontić & Vidicki's theory of digital transformation.* ***Results****: The digital mindset dimension has increased despite employee resistance, while digital practices have been running since 2009 with an achievement of 13 times WTP opinions. However, data integration is not yet optimal and employee skills in using the system are still limited. The main obstacles include low technology adaptation, the absence of a clear digital transformation roadmap, and data fragmentation between systems. Improvement efforts through workshops, collaborative training with the Ministry of Home Affairs, and the preparation of a digitalized LKPD Regent Regulation are expected to strengthen system integration and encourage transformation to a more mature stage, as long as it is supported by a structured roadmap and ongoing commitment.* ***Conclusion****: Digital transformation in the preparation of local government financial reports in Kudus Regency has reached maturity because Kudus Regency has involved the formation of understanding and application of technology and culture, but has not fully mastered digitalization in the preparation of local government financial reports.*

Keywords: Accounting, Accountability, Digital Transformastion, Financial reports, Local Goverment

ABSTRAK

Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP): Transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah masih belum berjalan dengan kurang baik ditandai adopsi teknologi informasi dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) masih belum optimal dengan ditemukannya 678 temuan terkait kelemahan sistem informasi akuntansi. Transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah terhambat karena adanya eror sistem proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, fitur penyusunan pelaporan belum sepenuhnya sempurna serta Pengguna yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami serta mengoperasikan sistem. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan menganalisis Transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori transformasi digital menurut Kontić & Vidicki **Hasil:** Pola pikir digital mengalami peningkatan meski terdapat resistensi pegawai, sementara praktik digital telah berjalan sejak 2009 dengan capaian 13 kali opini WTP. Namun, integrasi data belum maksimal dan keterampilan karyawan dalam menggunakan sistem masih terbatas. Hambatan meliputi adaptasi teknologi yang rendah, belum adanya roadmap transformasi digital yang jelas, dan fragmentasi data antar sistem. Upaya perbaikan melalui workshop, pelatihan kolaboratif dengan Kemendagri, serta penyusunan Perbup LKPD terdigitalisasi diharapkan dapat memperkuat integrasi sistem dan mendorong transformasi ke tahap lebih matang, asalkan didukung roadmap yang terstruktur. **Kesimpulan:** Transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus sudah sampai pada pendewasaan karena Kabupaten Kudus sudah melibatkan pembentukan pemahaman dan penerapan teknologi dan budaya, namun belum sepenuhnya menguasai digitalisasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Akuntansi, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, SAPD ,Transformasi Digital.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan telah menjadi fenomena global yang semakin mendalam dan luas, terutama sejak era digitalisasi (Ardianto et al., 2024). Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah berbagai negara bertransformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Sementara itu di Indonesia, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi kebutuhan yang semakin urgent dan mendesak Indriyani & Mappanyukki(2022). Digitalisasi dalam sistem administrasi keuangan daerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi keharusan guna memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel (Wirtz et al., 2020). Digitalisasi berdampak otomatisasi dan digitalisasi manajemen perencanaan strategis untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan pengambilan Keputusan Rashid Al-Shamsi (2024). Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam pelaporan keuangan. Inovasi digital yang terintegrasi dengan praktik akuntansi telah mengubah paradigma, termasuk cara pengolahan, analisis, dan penyajian data keuangan. Dampaknya, para pemangku kepentingan kini melihat transformasi dalam penyampaian dan pemanfaatan informasi keuangan untuk mendukung keputusan bisnis Aniefiok (2024). perkembangan digital telah meruntuhkan batasan waktu dalam proses pelaporan keuangan. Dengan sistem akuntansi berbasis cloud, akses data dan penyusunan laporan dapat dilakukan secara instan, memberikan informasi keuangan terbaru kepada pihak terkait. Kelenturan ini memungkinkan perusahaan mengambil keputusan lebih cepat serta merespons perubahan pasar secara lebih proaktif Rahman & Olibe (2021). digitalisasi telah menandai dimulainya era otomatisasi, yang mengubah tugas-tugas akuntansi rutin menjadi lebih efisien. Teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) mampu mempercepat pengolahan data, meminimalkan campur tangan manusia, dan menekan potensi kesalahan manual. Selain memperpendek siklus akuntansi, otomasi ini juga membebaskan tenaga ahli untuk berkonsentrasi pada analisis strategis dan kontribusi dalam pengambilan keputusan bisnis. Schoder & Leoni (2017).

Faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana daerah adalah penerapan teknologi informasi (TI). Untuk mencapainya, pemerintah harus memaksimalkan pengembangan infrastruktur TI guna mendukung program pelayanan publik, memperluas kemudahan akses layanan secara efisien dan ekonomis, serta mengefektifkan koordinasi lintas unit. Adopsi TI yang tepat mampu mempercepat proses layanan di

sektor pemerintahan dan meningkatkan ketepatan data keuangan, sehingga memperkuat aspek transparansi dan pertanggungjawaban Nasir & Oktari (2011). Kualitas laporan keuangan memegang peranan dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Laporan yang andal menyediakan dasar bagi para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan data tersebut dalam menilai kinerja ekonomi suatu entitas. Dengan demikian, informasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menilai keabsahan laporan entitas sekaligus menentukan keputusan finansial yang tepat (Sulaiman Kantudu & Alhassan, 2022) .Peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya memperkuat relevansi dan keandalan data akuntansi, tetapi juga memperluas praktik akuntansi yang terbuka. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap akuntabilitas manajerial melalui penyajian informasi yang komprehensif (Rezaei Pitenoei et al., 2020). Namun, Kondisi saat ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) masih belum optimal. Hal ini tercermin dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per 2022, yang mencatat sebanyak 678 temuan terkait kelemahan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Angka ini mencapai 35% dari total temuan audit, mengindikasikan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya mampu mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel (BPK,2022).

Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih mengalami kendala seperti jaringan yang tidak stabil sehingga menimbulkan disrupsi dalam aliran informasi, mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan gangguan pada proses administrasi pemerintahan daerah.Selain itu Fitur pelaporan dengan mengadopsi teknologi belum sepenuhnya sempurna, dengan beberapa modul yang dinilai kurang user-friendly dan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Sejalan dengan (Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, 2020) itu implementasi sistem SIPD belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal, disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan dan memahami mekanisme pengoperasian teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Banyak pengguna yang masih membutuhkan waktu lebih untuk memahami cara kerja sistem ini, terutama pada fitur-fitur baru yang diperbarui secara berkala(Subroto & A. A. Uliansyah, 2023). Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kesalahan penginputan data dan memperlambat proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.

1.2 Kesenjangan Masalah

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan Transformasi digital dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di beberapa daerah, Transformasi digitaldengan penggunaan teknologi guna meningkatkan kualitas laporan keuangan berdampak siginifikan, sementara di daerah lain justru penggunaan teknologi tidak berdampak secara signifikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti Transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Padahal, daerah ini telah Telah meraih Predikat WTP sebanyak tiga belas kali pada sejak tahun 2012. Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, seperti resitensi terhadap perubahan dan inovasi pada pegawai di era digitaliasi

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan administratif dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh

mana Transformasi digital di Kabupaten Kabupaten Kudus dalam penyusunan laporan keuanga pemrintah daerah, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya perbaikan yang telah dilakukan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam transformasi digital dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan fenomenna transformasi digital yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuanganpemerintah daerah (Suwanda & Moenek, 2019). Selain itu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah bertransformasi di akuntansi berbasis kas dan sekrang yang digunakan akuntasi berbasis akrual membaut perbedaan yang siginifikan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Sinurat, 2018). Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan temuan terkait laporan keuangan pemerintah daerah dan penggunaan teknologi informasi. Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa kualitas teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Nilamsari (2021)yang menemukan bahwa kualitas teknologi informasi tidak berdampak signifikan pada kualitas laporan keuangan tersebut. Di sisi lain, Sari dan Fadli (2017) mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang tidak sejalan dengan temuan Yuliani dan Agustini (2016) terkait penerapan akuntansi. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus di era transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyajikan informasi yang andal, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, Penelitian oleh (Tumija et al., 2023) yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kota Semarang menunjukan kemampuan SDM berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dimana terdapat kesulitan dalam mengadaptasikan teknologi dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah dearah dengan menggunakan sistem AKLAP dan SIPD. Penelitian Nidya Vitriana, Agustiawan, dan Muhammad Ahyaruddin (2022) dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan penggunaan teknologi dalam pengelolaan Keuangan belum efektif. Akan tetapi integrasi antar data terlihat mengalami peningkatan.

1.4 Pernyataan Karya Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang ditunjukkan melalui beberapa aspek pembeda yang signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut meliputi aspek tema atau fokus kajian, metode dan teori yang digunakan, konteks kebijakan daerah, karakteristik objek penelitian, serta temuan hasil yang lebih komprehensif. Kebaruan ini menjadi kekuatan utama penelitian untuk memperluas wawasan ilmiah mengenai implementasi kebijakan digital dalam tata kelola keuangan publik.

Penelitian ini berbeda dari sisi tema/topik, penelitian ini secara khusus mengetahui transfromasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dearah Kabupaten Kudus. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Tumija (2023) yang hanya terfokus pada pengunaan teknologi tidak mengarahkan pada proses transformasi digital yang terjadi pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mendalami tentang

proses dan perkembangan digitalisasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus, tidak hanya meneliti tentang aspek teknisny saja . Kemudian, dari sisi metode dan teori, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori Transformasi Digital (Kontić & Vidicki, 2018).Teori ini memiliki dimensi pola pikir digital, praktik digital, integrasi dan keterampilan karyawan. Lebih lanjut untuk mengetahui sampai ditingkat mana transformasi digital Kabupaten Kudus telah berada peneliti menggunakan teori (Aksu, 2024). Dimana Tingkat Tranasformasi digital dibagi menjadi lima tingkatan dimana mualai dari fase persiapan, fase pendewasaan, fase penguasaan , fase menuju direfensi , dan pada tingkat akhir transformasi digital ialah pada fase kesuksesaan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus, Pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tigas belas tahun berturut-turut. Penelitian ini mengangkat kesenjangan antara capaian administratif dengan realitas implementasi di lapangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di kota besar yang memiliki sumber daya dan infrastruktur teknologi yang berbeda.. Sehingga penelitian ini berbeda dari segi karekteristik objek penelitian.

Keempat, dari sisi hasil dan temuan, penelitian ini tidak hanya menemukan hambatan seperti keterbatasan fitur sistem yang tersedianya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman SDM, dan kendala akses sistem, tetapi juga mengungkapkan tingkat transformasi digital yang sedang terjadi di Kabupaten Kudus dalam konteks penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini berbeda dari penelitian lainnya yang sebagian besar hanya menyoroti masalah pengunaan teknologi atau sistem. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi aplikatif, tidak hanya normatif, dan menjawab kebutuhan pemerintah daerah dalam proses transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.

Terakhir, penelitian ini menawarkan keunggulan empiris melalui pengumpulan data melalui tiangulasi data , dengan data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap proses transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus, wawancara dengan pegawai di BPKD, dan dokumentasi. Pendekatan ini menghadirkan perspektif empiris yang jarang ditemukan pada studi yang hanya mengandalkan survei atau kajian dokumen.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Hambatan serta upaya yang dilakukan oleh BPPKD Kabupaten Kudus dalam transformasi digital dalam penyusunana laporan keuangan pemerinatah daerah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Metode ini dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif mengenai kondisi aktual di lapangan, hambatan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi yang dilakukan oleh instansi terkait berdasarkan perspektif langsung dari para pelaku kebijakan dan pelaksana teknis.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell merupakan suatu metodologi penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara

mendalam makna oleh individu atau kelompok terhadap fenomena (Creswell, 2016). Melalui pendekatan kualitatif, penulis dapat mengeksplorasi kompleksitas fenomena yang diteliti secara holistik dan kontekstual. Pendekatan kualitatif melibatkan penggunaan sistem konseptualdan kerangka analitis yang komprehensif untuk menginformasikan hasil penelitian. Penelitian kualitatif, sebagaimana diuraikan oleh memiliki tujuan utama untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi fenomena secara komprehensif Penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif. Metode deskriptif dipilih karena kemampuannya dalam menyajikan gambaran komprehensif yang terperinci mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian penulis mendeskripsikan fenomena transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah untuk kemudian dilakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Pemilihan metode ini juga didukung oleh pandangan (Simangunsong, 2017), yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, termasuk perubahan informasi atau fenomena yang muncul selama proses pengumpulan data. Dalam konteks transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah , pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas pelaksanaan sistem secara lebih utuh, baik dari sisi teknis implementasi maupun dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mengacu pada pendapat (Sugiyono, 2014), yang meliputi: wawancara dengan pihak-pihak yang berperan langsung dalam proses pengelolaan keuangan melalui SIPD RI, observasi terhadap aktivitas penginputan dan pelaporan keuangan menggunakan sistem, dokumentasi terhadap regulasi, laporan keuangan, dan hasil audit, serta studi pustaka sebagai penguat data teoritis dan konseptual.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu mereka yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan terdiri dari tujuh orang, yang mencakup pejabat struktural, operator SIPD RI, dan staf teknis pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Adapun lokasi penelitian dilakukan di kantor BPPKAD Pemerintah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025

III. Hasil dan Pembahasan

Untuk Mengukur Transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus, Peneliti menggunakan teori Transformasi digital oleh (Kontić & Vidicki, 2018) terdapat 3 dimensi dalam transformasi digital yaitu sebagai berikut:

1. Pola pikir digital dengan indikatornya budaya organisasi yang mendukung digitalisasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan komitemen organisasi dalam menerapkan digitalisasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Praktik digital dengan indikatornya kegiatan dan kebijakan yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Integrasi data dengan indikatornya kemudahan dalam akses data serta data yang tersedia dan terhubung antar sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah kabupaten kudus

4. Keterampilan karyawan dengan indikatornya pengetahuan dan keterampilan pengunaan teknologi infomasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

3.1. Transformasi Digital Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

Dimensi pertama, Pola pikir digital merujuk pada cara pandang individu dalam menginternalisasi nilai-nilai teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari. Pola pikir ini menjadi dasar dalam membentuk sikap, persepsi, dan perilaku seseorang terhadap dinamika teknologi dan inovasi di era digital. Hal ini mencakup kompetensi dalam memahami, menerima, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara adaptif agar individu maupun organisasi mampu bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang terus berubah. Pada awalnya karyawan belum bisa dengan cepat untuk beradaptasi dengan digitalisasi, Bahkan pada saat ada sistem seperti SIDMA V.1 dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, pada tahun 2019 pada masa covid-19 memaksa karyawan untuk memiliki kesadaran akan pentingnya digitalisasi dalam memudahkan pekerjaan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga di tahun 2020 memiliki pola pikir literasi digital dan pada saat ini karyawan telah sampai pada tahap mengadopsi digitalisasi dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi yang berlandaskan budaya organisasi digital memungkinkan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih terstruktur. Sistem berbasis digital meminimalisasi peluang manipulasi data dan memastikan akurasi setiap laporan. Selain itu, transparansi yang dihasilkan akan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Budaya organisasi di BPPKAD Kudus mulai sangat terasa sejak adanya pandemi covid 19. Perubahan yang ada pada saat itu sangat mendadak dan memaksa setiap karyawan untuk memahami dan mengadopsi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Budaya digital terasa setelah ada WFH (work from home) dimana setiap pekerjaan dilakukan di rumah dan mulai sejak itu kita (pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus) dipaksa untuk memiliki kesadaran dan mengadopsi sistem yang terdigitalisasi. Sebelum-sebelumnya kita enggan mengadopsi digitalisasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah karena sistemnya rumit dan membutuhkan waktu untuk mempelajari. Hingga pada tahun 2024 kita terus mengikuti dan berdaptasi dengan sistem baru dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Perkembangan komitmen kabupaten Kudus dalam transformasi digital dapat dilihat dengan aset mengenai pemanfaatan teknologi, yang dulunya komputer dan wifi hanya untuk ruangan Kaban dan Kepala bidang, pada tahun 2024 BPPKAD Kudus memiliki infrastruktur terbilang lengkap dalam menunjang digitalisasi dengan adanya komputer sejumlah 53 unit di BPPKAD,untuk wifi ada 6 dimana setiap bidang memiliki 1 akses wifi dan 1 di ruangan kaban BPPKAD. Infrastruktur yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten menunjukan adanya komitmen organisasi dalam proses transformasi digital.

Transformasi digital dalam penyusun laporan keuangan secara digital dukungan pemerintah daerah seperti adanya landasan hukum sangat penting untuk dipedomani baik oleh staff ataupun pimpinan. Kabupaten Kudus sendiri pengelolaan keuangan telah diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga digitalisasi telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan SPBE di Kabupaten Kudus. Untuk laporan keuangan secara khusus belum diatur oleh pemda. Landasan hukum yang digunakan oleh kabupaten kudus sendiri terkait laporan keuangan penggunakan SIPD-RI langsung berpedoman pada surat perintah oleh kemendagri yaitu 600.5.4/4429/SJ tentang Implementasi SIPD-RI dalam proses penatausahaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga semua pengelolaan keuangan kabupaten kudus telah dilakukan menggunakan SIPD perencanaan sampai dengan proses pelaporan

Kabupaten Kudus telah memiliki perkembangan pola pikir digital yang bagus di era transformasi digital dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah ditandai dengan budaya digitalisasi dan komitmen yang ada dalam menyambut digitalisasi. Akan tetapi, masih terdapat pegawai yang resisten dengan perubahan dan inovasi.

Dimensi Kedua, Praktik digital, telah menjadi bagian dalam penyusunan laporan keuangan yang efisien dan akurat. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mengubah cara organisasi mengumpulkan dan memproses data keuangan, tetapi juga telah merevolusi seluruh proses akuntansi dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Penerapan teknologi informasi yang mendukung Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAPD) di Kabupaten Kudus terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berikut adalah sistem yang digunakan oleh Kabupaten Kudus dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai berikut:

Perkembangan sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah BPPKAD Kabupaten Kudus

No	Tahun Berlaku	Sistem yang digunakan
1	>2009	Manual (Exel)
2	2009-2015	SIMDA V.1
3	2015-2020	SIMDA Keuangan Versi 2.7.0.6
4	2020-2022	SIMDA Keuangan Versi 2.9.0.1
5	2022-2023	SIMDA Next generation
6	2023-2024	SIPD-RI

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dimulai pada tahun 2009, ketika Kabupaten Kudus mulai menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi SIMDA versi awal, yang dikenal sebagai SIMDA Keuangan v.1, dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih sistematis dan efisien. Seiring waktu, aplikasi ini terus mengalami penyempurnaan, dimulai dengan peluncuran SIMDA v.2 dan berbagai versi lanjutan lainnya hingga mencapai versi terbaru pada tahun 2022, yaitu SIMDA Next-Generation. Manfaat penggunaan aplikasi SIMDA dirasakan secara luas oleh pemerintah daerah, baik dari sisi kemudahan operasional aplikasi maupun dukungan fasilitasi teknis yang diberikan oleh BPKP. Keberadaan kantor perwakilan BPKP di setiap provinsi menjadi salah satu keunggulan utama, karena memungkinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan bimbingan teknis secara cepat dan memadai. Dukungan ini tidak hanya memastikan kelancaran penggunaan aplikasi tetapi juga meningkatkan kompetensi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dan sistem yang paling terbaru dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan SIPD-RI yang mempunyai *one system.* BPPKAD Kabupaten Kudus telah melakukan digitalisasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah untuk dilihat dari sisi efektivitas memang belum efektif karena sering terkendalanya sistem sekarang (SIPD-RI) dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya yaitu SIMDA, sering terkendala di jaringan atau lag saat aplikasi digunakan, bahkan pada ada hari dimana SIPD-RI hanya bisa diakses pada jam jam tertentu di luar jam kerja, sehingga menyebabkan adanya praktek digital tidak dapat dilakukan secara efektif dan effisien

Digitalisasi membantu Kabupaten Kudus untuk mendapatkan predikat WTP sebanyak 13 kali, Kabupaten Kudus merupakan pemerintah daerah yang konsisten dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah secara wajar, andal dapat dipercaya dan dapat dibandingkan. Peran teknologi sangat membantu pemerintah kabupaten kudus untuk mendapatkan predikat WTP.

Integrasi data menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyediakan akses terhadap data relevan dan alat kolaborasi yang mendukung kerja sama antar tim selama penyusunan laporan keuangan. Di era transformasi digital, Integrasi data tidak hanya mencakup ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga sejauh mana sistem dan platform dapat saling terhubung. Integrasi data yang mendukung Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) di Kabupaten Kudus terus mengalami perkembangan. Berikut adalah integrasi sistem yang digunakan oleh Kabupaten Kudus dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai berikut :

Perkembagan Integrasi Data Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

Tahun	Sistem	Integrasi dengan Aklap	Output
>2009	Manual	Tidak ada Integrasi dengan AKLAP	Proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual, dengan risiko kesalahan tinggi.
2009-2015	SIMDA V.1	Integrasi awal dengan AKLAP, tetapi masih banyak data yang diinput secara manual.	Integrasi dasar dengan pengelolaan data keuangan, namun masih terbatas pada input manual.
2015-2020	SIMDA Keuangan Versi 2.7.0.6	Meskipun ada integrasi, data masih perlu diinput ke AKLAP secara manual.	Peningkatan integrasi data, memungkinkan pengelolaan laporan keuangan lebih terstruktur.
2020-2022	SIMDA Keuangan Versi 2.9.0.1	Meningkatkan integrasi, memungkinkan data untuk diekspor ke AKLAP dengan lebih efisien.	Integrasi dengan sistem perencanaan anggaran dan pelaporan, meningkatkan akurasi data.
2022-2023	SIMDA Next Generation	Integrasi penuh dengan AKLAP, memungkinkan data untuk terhubung secara otomatis, mengurangi kesalahan input.	Integrasi lebih lanjut dengan sistem informasi manajemen, mendukung pelaporan secara real-time.
2023-2024	SIPD RI	Integrasi menyeluruh dengan AKLAP, memungkinkan data untuk terhubung langsung, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, integrasi data secara menyeluruh dengan pusat, mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah menunjukkan evolusi dari tahun ke tahun. Sebelum 2009, proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual tanpa integrasi dengan AKLAP, sehingga berisiko tinggi terjadi kesalahan. Pada periode 2009–2015, SIMDA V.1 diperkenalkan dengan integrasi awal ke AKLAP, meski sebagian besar data masih diinput manual. Peningkatan terjadi di 2015–2020 melalui SIMDA Keuangan Versi 2.7.0.6 yang memungkinkan pengelolaan laporan lebih terstruktur, walau integrasi dengan AKLAP masih terbatas. Tahun 2020–2022, versi 2.9.0.1 meningkatkan efisiensi ekspor data ke AKLAP dan integrasi sistem perencanaan anggaran, memperbaiki akurasi. Transformasi besar terjadi pada 2022–2023 dengan SIMDA Next Generation yang menyediakan integrasi penuh dengan AKLAP, mengurangi input manual dan mendukung pelaporan *real-time*. Puncaknya, pada 2023–2024, SIPD RI mengintegrasikan data secara menyeluruh dengan pusat melalui AKLAP, mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Setiap fase memperlihatkan kemajuan dari ketergantungan manual menuju otomatisasi penuh, dengan output yang semakin andal dan sesuai prinsip tata kelola modern.

Transformasi digital memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dengan adanya integrasi antara Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) dengan Sistem Informasi keuangan Daerah (SIKD). SIPD-RI dan SIKD berperan penting dalam akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. SIPD dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai platform yang digunakan pemerintah daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan. Sementara itu, SIKD yang dikelola oleh Kementerian Keuangan berfungsi sebagai sistem integrasi yang mengumpulkan dan menganalisis data keuangan daerah untuk keperluan evaluasi fiskal dan penyusunan kebijakan keuangan nasional. Sekretaris Badan BPPKAD Kabupaten Kudus menjelaskan integrasi antara SIPD-RI dan SIKD Adanya integrasi antara SIPD-RI dan SIKD. Dengan sistem yang saling terhubung, data keuangan bisa dikelola lebih akurat, transparan, dan efisien. Jadi, laporan yang dihasilkan lebih berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan.SIPD-RI membantu dalam pencatatan dan pengelolaan data keuangan daerah secara sistematis, sehingga data yang dibutuhkan bisa diakses dengan cepat dan akurat. Sementara itu, SIKD mengolah dan menyajikan informasi keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Dengan adanya sistem ini, pengendalian internal lebih baik, dan laporan keuangan jadi lebih andal serta terpercaya”

Era transformasi digital, kebutuhan akan sistem yang terintegrasi semakin mendesak guna mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Penggunaan berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang belum sepenuhnya terhubung satu sama lain, sehingga menyulitkan konsolidasi data. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, inkonsistensi data, serta potensi terjadinya kesalahan dalam penginputan dan rekonsiliasi keuangan Pernyataan terebut didukung oleh Kepala Bidang aset BPPKAD Kabupaten Kudus bahwa belum adanya integrasi yang terjadi di SIPD-RI dengan sistem pengelolaan aset di Kabupaten Kudus Dengan adanya pengunaan SIPD-RI menyulitkan adanya konsistensi data yang terjadi, dimana pada saat pengunaan SIPD-RI masih klasifikasi aset yang ada. Kabupaten Kudus memiliki sistem dalam pengelolaan aset dengan kodefikasi dan klasifikasi yang berbeda dengan SIPD-RI. Terdapat perbedaan saat memasukan di SIPD-RI dengan sistem pengelolaan aset kita. Misalnya kita melakukan pencatatan aset seperti meja, di sistem kita telah ada rinci seperti spesikasi mejanya sedangkan di SIPD-RI hanya spesikasi secara umum. Sehingga nanti akan terjadinya perbedaan data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kudus.

Keterampilan karyawan telah menjadi faktor fundamental yang menentukan keberhasilan transformasi digital dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Kudus. Dalam era yang didominasi teknologi informasi, kemampuan karyawan untuk mengoperasikan dan memahami sistem digital menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi standar andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Pengetahuan teknologi telah bertransformasi menjadi alat kerja utama bagi pegawai era modern, bukan hanya untuk mempercepat

penyelesaian tugas tetapi juga untuk memastikan akurasi dan transparansi yang lebih optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterampilan ini tidak terbatas pada kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, melainkan mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara strategis ke dalam proses kerja. Dengan kompetensi digital yang mumpuni, karyawan BPPKAD Kabupaten Kudus mampu memanfaatkan sistem seperti SIPD-RI secara maksimal mulai dari akses data, pengolahan informasi, hingga analisis laporan yang pada akan berkontribusi signifikan terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyusunan LKPD secara keseluruhan.

Transformasi digital telah menjadi prioritas strategis di BPPKAD Kabupaten Kudus, kesenjangan keterampilan digital di antara karyawan masih menjadi tantangan substansial yang perlu diatasi. Sebagian besar karyawan di BPPKAD Kabupaten Kudus sudah mengerti tentang digitalisasi, tetapi masih ada yang belum paham tentang teknologi yang sangat kompleks pada sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, karyawan yang belum sepenuhnya memahami sistem canggih seperti SIPD-RI atau AKLAP. Kesenjangan ini semakin dipertegas oleh temuan bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah cenderung menunjukkan resistensi terhadap inovasi teknologi karena takut melakukan kesalahan, sehingga lebih memilih untuk mendelegasikan tugas-tugas berbasis digital kepada rekan kerja yang lebih kompeten. Fenomena ini menciptakan ketergantungan dalam alur kerja yang berpotensi menghambat efisiensi organisasional secara keseluruhan. Kesenjangan keterampilan ini juga menimbulkan risiko keberlangsungan operasional jangka panjang, terutama ketika pegawai dengan kompetensi digital yang tinggi tidak tersedia atau beralih tugas, yang dapat menyebabkan gangguan dalam proses penyusunan LKPD yang kini sangat bergantung pada sistem terintegrasi berbasis teknologi.

Tuntutan transformasi digital seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berjenjang dan pendampingan intensif. Contohnya, karyawan yang awalnya takut menggunakan SIPD-RI perlu dibekali modul pelatihan praktis dengan pendekatan learning by doing, disertai simulasi skenario kesalahan untuk membangun kepercayaan diri. Keberhasilan peningkatan keterampilan digital tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada komitmen kepemimpinan dan dukungan infrastruktur. Pimpinan BPPKAD Kudus perlu merancang program pelatihan yang inklusif, memastikan tidak ada pegawai yang tertinggal karena latar belakang pendidikan atau usia. Investasi dalam penyediaan helpdesk TI, modul e-learning interaktif, atau mentorship antargenerasi dapat menjadi solusi. Di sisi lain, penyederhanaan antarmuka sistem seperti SIPD-RI untuk pengguna pemula juga diperlukan guna mengurangi kompleksitas yang memicu kecemasan. Dengan sinergi antara peningkatan kompetensi, dukungan teknis, dan kepemimpinan yang visioner, transformasi digital di Kabupaten Kudus dapat menghasilkan LKPD yang tidak hanya tepat waktu, tetapi juga menjadi rujukan akuntabilitas nasional.

3.2. Faktor Penghambat Transformasi Digital Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

Salah satu kendala yang ada saat proses transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan daerah ialah masih terdapat pegawai yang belum dapat beradaptasi dengan teknologi, terutama pegawai dengan tingkat pendidikan rendah yang menunjukkan kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Kendala adaptasi pengunaan teknologi berpotensi menghambat efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memperlambat proses transformasi digital yang sedang diupayakan oleh pemerintah kabupaten tersebut.Pegawai dengan tingkat pendidikan rendah memiliki kecenderungan untuk susah beradaptasi dengan teknologi dan inovasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kudus. Hambatan dalam mengadopsi transformasi digital untuk penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Kudus dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, dan ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman dasar tentang teknologi itu sendiri. Banyak individu, terutama yang berasal dari generasi yang tidak tumbuh dengan perangkat digital, merasa kesulitan dalam memahami konsep-konsep mendasar yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang semakin digital. Ketakutan akan perubahan dan keengganan untuk meninggalkan zona nyaman juga merupakan hambatan yang tidak boleh diabaikan. Banyak individu merasa aman dan nyaman dalam cara kerja yang

sudah terbiasa, dan ketika didorong untuk mengubah metode atau alat yang mereka gunakan, mereka sering kali mengalami resistensi. Ketakutan akan ketidakpastian, kombinasi dengan kekhawatiran mengenai kemungkinan keterampilan yang selama ini mereka anggap cukup akan menjadi usang, dapat memperburuk situasi.

Kendala lain transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ialah tidak adanya peta jalan yang jelas, pemerintah daerah sering bergerak tanpa arah strategis, membuat proses transformasi digital dalam pengelolaan keuangan berjalan lambat dan tidak terkoordinasi. Akibatnya, upaya digitalisasi cenderung bersifat sporadis, tidak berkelanjutan, dan tidak memiliki indikator keberhasilan yang terukur.Ketiadaan roadmap juga berdampak pada alokasi anggaran yang tidak efisien untuk teknologi informasi. Pemerintah daerah seringkali mengalokasikan dana untuk pengadaan perangkat teknologi tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan integrasi dengan sistem yang ada. Hal ini menyebabkan kurangnya integrasi antar sistem dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus, yang pada akhirnya menghambat proses konsolidasi data keuangan yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan komprehensif.

Tidak adanya roadmap yang jelas dalam transformasi digital menciptakan inkonsistensi dalam kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan keuangan digital. Setiap pergantian kepemimpinan atau perubahan kebijakan di tingkat pusat dapat menyebabkan reorientasi strategi digital tanpa mempertimbangkan kontinuitas dan investasi yang telah dilakukan sebelumnya. Ketidakpastian ini membuat pemerintah daerah ragu untuk melakukan investasi besar dalam transformasi digital sistem keuangan mereka, karena khawatir sistem tersebut akan menjadi usang atau tidak relevan dalam waktu singkat. Ketiadaan roadmap transformasi digital membuat pemerintah daerah tidak memiliki kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai risiko terkait penerapan teknologi baru dalam pengelolaan keuangan. Risiko seperti keamanan data, privasi, dan kepatuhan terhadap regulasi seringkali tidak dipertimbangkan secara menyeluruh, yang dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum dan reputasi yang serius bagi pemerintah daerah

Kurangnya integrasi antara sistem dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten kudus dalam transformasi digital. Kurangnya integrasi antara sistem dalam proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus menjadi permasalahan mewujudkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Era transformasi digital, kebutuhan akan sistem yang terintegrasi semakin mendesak guna mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Penggunaan berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang belum sepenuhnya terhubung satu sama lain, sehingga menyulitkan konsolidasi data. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, inkonsistensi data, serta potensi terjadinya kesalahan dalam penginputan dan rekonsiliasi keuangan

3.3. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatsi Hambatan Transformasi Digital Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus telah menunjukkan komitmennya untuk terus beradaptasi. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah dengan menyelenggarakan workshop khusus yang membahas transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai jawaban atas tantangan yang muncul dari sistem keuangan yang kini serba digital. BPPKAD Kabupaten Kudus dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis dalam pelaksanaan workshop yang diselenggarakan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek manajemen perubahan, dengan menyadari bahwa resistensi sering kali bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis, budaya organisasi, dan ketidakpastian terhadap hasil dari perubahan itu sendiri.

Workshop dilakukan dengan tujuan terbentuk rasa menguasai terhadap proses perubahan, sehingga setiap individu dalam organisasi merasa menjadi bagian penting dari transformasi yang sedang dijalankanSerangkaian workshop transformasi digital yang diselenggarakan BPPKAD Kabupaten Kudus mulai terlihat dari meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan

Kabupaten Kudus berhasil tiga belas kali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga belas tahun berturut-turut

Transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tahun perubahan dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Kudus, mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan keuangan daerah. Perubahan ditandai dengan pengunaan sistem baru (SIPD-RI) yang mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan keuangan dalam satu platform digital. Transisi sistem ini, Kabupaten Kudus memiliki keuntungan tersendiri karena beberapa pemerintah daerah lainnya telah lebih dulu mengadopsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Republik Indonesia (SIPD-RI) pada tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman daerah-daerah tersebut menjadi laboratorium pembelajaran yang berharga bagi Kabupaten Kudus sebelum sepenuhnya mengadopsi sistem baru ini. Kabupaten Kudus dapat mengamati bagaimana daerah lain mengatasi berbagai tantangan teknis maupun non-teknis selama masa transisi dengan memperhatikan best practices yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya, Kabupaten Kudus dapat mempersiapkan langkah-langkah antisipasi yang lebih matang. Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki kesempatan untuk menjalin kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah yang telah berpengalaman dalam mengadopsi SIPD-RI. Melalui kolaborasi ini, Kabupaten Kudus dapat mengakses pengetahuan praktis yang tidak selalu tersedia dalam juknis ataupun video tutorial

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa Transformasi digital dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus sudah sampai pada pendewasaan. Hal tersebut tercermin dari budaya organisasi dalam melibatkan dan menerapkan digitalisasi penyusunan laporan keuangan dinilai telah baik walaupun masih terdapat beberapa pegawai yang resisten terhadap perubahan dan inovsi. Selain itu komitmen Kabupaten Kudus dalam bertransformasi terlihat baik dapat dilihat dari infrastruktur yang menunjang digitalisasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Praktik digital yang dilakukan kabupaten kudus pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sangat baik dimana dapat mengikuti setiap perubahan dan inovasi sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Ketrampilan dan pengetahuan karyawan sudah dapat mengikuti perkembangan zaman yang inovatif , tetapi masih terdapat karyawan yang belum dapat menguasai sistem. Integrasi dinilai masih belum optimal karena masih adanya inkonsistensi data dalam penyusunan lapoan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.

Terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa kualitas teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kabupaten Kudus berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK sebanyak tiga belas kali terturut turut mulai dari tahun 2012, dimana teknologi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keunagan pemerintah daerah yang andal, relevean, dapat dipahami dan dapat dibandingkan .

Penelitian yang dilakukan oleh Nilamsari (2021)menunjukan bahwa kualitas teknologi informasi tidak berdampak signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan situasi yang dialami di Kabupaten Kudus, diamana teknologi berpengaruh dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian oleh Tumija et al.,(2023)yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kota Semarang menunjukan kemampuan SDM berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dimana terdapat kesulitan dalam mengadaptasikan teknologi dalam proses penyusunan laporan

keuangan pemerintah dearah dengan menggunakan sistem AKLAP dan SIPD. Hal tersbut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diaman keterampilan dan pengatahuan pegawai dalam memahami teknologi dan sistem yang digunakan pada penyusunan laporan keuangan pemerinath daeah Kabupaten Kudus berpengaruh secara signifikan. Ketrampilan dan Pengetahuan Karyawan pada teknologi dan sistem membantu dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Nidya Vitriana, Agustiawan, dan Muhammad Ahyaruddin (2022). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan penggunaan teknologi dalam pengelolaan Keuangan belum efektif. Akan tetapi integrasi antar data terlihat mengalami peningkatan.berbeda dengan hasil penelitian dimana teknologi berpengaruh dalam meningkatkan kaulitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Akan tetapi, penelitian ini memilikinpersamaan dengan hasil penelitian dimana integrasi penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten untuk untuk menghindari inkonsistensi data dan memberikan infomasi yang andal, relevan, dapat dipahami serta dapat dibandingakn.

IV. Kesimpulan

Transformasi digital Kabupaten Kudus telah mencapai tahap pendewasaan, ditandai dengan percepatan pola pikir digital pasca-Covid-19, penggunaan sistem informasi keuangan seperti SIMDA dan migrasi ke SIPD-RI pada 2024, serta peningkatan integrasi data meski masih terdapat tantangan klasifikasi aset dan keselarasan sistem. Kabupaten Kudus berhasil mempertahankan predikat WTP selama 13 tahun, namun faktor penghambat meliputi resistensi pegawai terhadap teknologi, belum adanya road map yang jelas dan integrasi data antar sistem yang belum optimal. Upaya mengatasi kendala dilakukan melalui workshop, forum diskusi ke daerah yang lebih maju.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kudus beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yangmembantu dan mensukseskan pelaksanaaa penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Aksu, H. (2024). *The 5 Phases of Digital Transformation Towards Maturity*. Digitopia. https://digitopia.co/blog/5-phases-of-digital-transformation/

Aniefiok, N. (2024). Impact of Digital Transformation on Financial Reporting in the 21st Century. *International Journal of Comparative Studies and Smart Education*, *1*(1), 34–45. https://academicajournal.com/IJCSSE/index

Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Apriliana Dewi, L. O., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 80–88. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.114

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. sage.

Indriyani, D., & Mappanyukki, R. (2022). The effect of government accounting standards, utilization of information technology, and accounting internal control on the quality of financial reports with organizational commitments as moderating variables. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(4), 1994–2006. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2788

Kontić, L., & Vidicki, Đ. (2018). Strategy for digital organization: Testing a measurement tool for digital transformation. *Strategic Management*, *23*(2), 29–35. https://doi.org/10.5937/straman1801029k

Nasir, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi*, *19*(02), 1–14.

Nilamsari, Y., Sukesti, F., Alwiyah, A., Hanum, A. N., & Agung Santoso, R. E. W. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi OPD Kota Semarang. *Maksimum*, *10*(2), 85. https://doi.org/10.26714/mki.10.2.2020.85-94

Rahman, M. H., & Olibe, K. O. (2021). The Impact of Cloud Computing on Accounting Information Systems: A Review and Future Directions. International Journal of Accounting Information Systems, 40, 100521

Rashid Al-Shamsi, I. (2024). Empowering Higher Education Through Digital Transformation and Strategic Planning for Academic Advancement. *Emerging Science Journal*, *8*(Special issue), 321–334. https://doi.org/10.28991/ESJ-2024-SIED1-019

Rezaei Pitenoei, Y., Safari Gerayli, M., & Abdollahi, A. (2020). Financial reporting quality and firms' information environment: a case of Iranian firms. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *14*(3), 541–560. https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0146

Sari, G.I., & Fadli, F. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi, 7(3), 17-34. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.3.17 34

Schoder, D., & Leoni, G. (2017). The Impact of Big Data on Accounting: A Use-Case Approach. Journal of Information Systems, 31(3), 113-128.

Simangunsong. (2017). *Metode penelitian sosial kualitatif*. Rajawali Pers.

Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia Indonesia.

Subroto, I., & A. A. Uliansyah, B. (2023). Evaluasi Perspektif Pengguna Terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten X). *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, *7*(2), 140–157. https://doi.org/10.31092/jmkp.v7i2.2578

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.Bandung. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta.*, *April 2015*, 31–46.

Sulaiman Kantudu, A., & Alhassan, I. (2022). Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter) 6 Audit committee and financial reporting quality in listed non-financial firms in Nigeria. *Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter*, *11*(1), 2022.

www.arabianjbmr.com

Suwanda, D. &, & Moenek, R. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (N. Muliawati Nur (ed.); 1st ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Tumija, Hendra, A., & Dkk. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Siagian , n . d .). Manusia telah mengembangkan peningkatan teknologi ya. *Jurnal Media Birokrasi*, *5*(1), 79–91.

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Sturm, B. J. (2020). The Dark Sides of Artificial Intelligence: An Integrated AI Governance Framework for Public Administration. *International Journal of Public Administration*, *43*(9), 818–829. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1749851

Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di BadanPerencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, *2 (5)*.

Yuliani, N.L., & Agustini, R.D. (2016). Factors affecting the quality of local government financial Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 124 14(1), 56-64 https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/.